

SENAYAN

DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT

Tabloid SENAYAN Edisi 37 Thn. VI Tanggal 01 - 07 Maret 2010

Rp. 7.500,- /Luar Jawa Rp10.000,-

Demokrat Dendam dengan PKS



6

Kesimpulan akhir Pansus Hak Angket Century telah menyeret sejumlah parpol pendukung koalisi ke dalam pusaran konflik. Dua parpol yang berada dalam barisan koalisi, Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terlibat saling serang.

Andi Mallarangeng Meninggalkan OKP

Akhirnya, setelah 100 hari

BONGKAR Bedeng PP di Komplek Parlemen

Kepemudaan (OKP) Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengadakan silaturahmi dan temu konsultasi dengan OKP Tingkat Nasional, Senin (22/2) malam di Wisma Karsa Pemuda, Jakarta. Pada saat yang sama, berkumpul juga lebih dari 25 OKP di Sekretariat GM-FKPI dengan agenda yang sama pertemuan silaturahmi OKP. Ada apa dengan dunia kepemudaan kita? Apa ini bukti ketidakmampuan Menpora dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya?

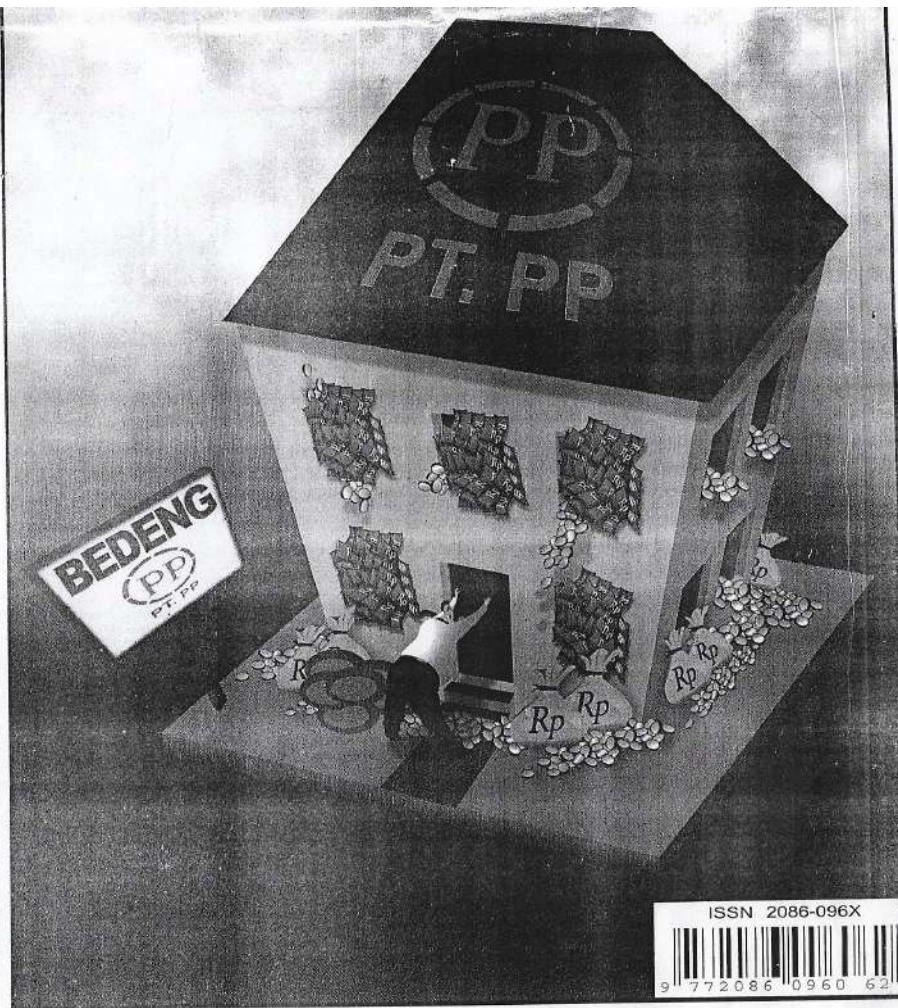


16

Sekjen DPR Mengusulkan Pembentukan BP-KPS

Tiga institusi (MPR, DPR dan DPD) berada di komplek parlemen senayan. Saat ini masih berjalan sendiri-sendiri didalam pengelolaan gedung dan fasilitas nya, juga sarana dan prasarana nya.

26



KASUS BANK CENTURY : UJIAN BAGI SUATU KOALISI

Oleh : Hotma P. Sibuea



**Bahkan,
Aburizal**

Kasus Bank Century selama beberapa pekan menjadi topik utama pemberitaan berbagai surat kabar dan televisi. Kasus ini layak mendapat porsi pemberitaan istimewa karena melibatkan orang-orang besar dan jumlah uang yang sangat besar. Pansus DPR yang menangani kasus ini sudah sampai pada tahap-tahap akhir masa kerjanya dan publik menunggu rekomendasi yang akan dibuat oleh Pansus DPR. Namun, terlepas dari hasil akhir rekomendasi Pansus DPR tersebut, penulis beranggapan banyak pelajaran yang dapat ditarik dari kasus Bank Century ini.

Sistem Multi Partai dan Koalisi Partai

Ketika reformasi struktur ketatanegaraan dilakukan pascareformasi

tai. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan umumnya diakhiri dengan mendirikan partai baru. Di lain, pihak sistem multi partai membuat sangat sulit membentuk satu mayoritas yang solid dan kuat di DPR. Padahal, untuk kesuksesan pelaksanaan tugas Presiden tentu saja dukungan mayoritas kuat dan solid di DPR sangat diperlukan. Oleh sebab itu, koalisi partai menjadi satu-satunya cara untuk membentuk mayoritas kuat dan solid di DPR untuk mendapatkan dukungan mayoritas bagi Presiden.

Ujian Bagi Soliditas Partai-partai Yang Berkoalisi

Semua orang menyadari kelemahan sistem multi partai tersebut termasuk Presiden terpilih. Oleh sebab itu,

dari kasus Bank Century. Selain itu, penersangkaan kadernya yakni Endin A.J. Sofihara Ketua PPP dan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dirasakan PPP sebagai tekanan. Di pihak lain Sekjen PDI-P Pramono Anung membuat pernyataan bahwa PDI-P tidak dapat ditekan. Bahkan, Abu Rizal Bakrie Ketua Umum Partai Golkar juga mengatakan "jangan pernah mengancam." (Kompas, 17 Februari, 2010). Fenomena dan pernyataan yang dikemukakan di atas seharusnya tidak perlu terjadi jika partai-partai peserta koalisi yang membentuk pemerintahan itu solid.

Pelajaran Untuk Masa Depan

Manuver-manuver politik yang disebut oleh berbagai pihak seba-

Bakrie Ketua Umum Partai Golkar juga mengatakan "jangan pernah mengancam."

tahun 1998 baik pada tataran suprastruktur maupun infrastruktur, kita berharap struktur ketatanegaraan Indonesia yang baru dapat membawa bangsa Indonesia pada kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan yang lebih baik dari sebelumnya. Pada saat amandemen UUD 1945, bangsa Indonesia dibayangi oleh gambaran masa lalu dengan kekuasaan Presiden yang sangat besar sehingga ketika UUD 1945 diamandemen, diberikan kewenangan yang besar kepada DPR dengan maksud untuk mengimbangi dan mencegah dominasi kekuasaan eksekutif seperti terjadi pada masa Orde Baru. Namun, publik mengetahui bahwa pascaamandemen UUD 1945, reformasi ketatanegaraan pada tataran suprastruktur telah menghasilkan DPR yang sangat kuat karena memiliki kewenangan yang sangat besar sehingga dapat mendominasi struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan. Dominasi kekuasaan DPR pada tataran suprastruktur diakui atau tidak sangat erat terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Presiden.

Reformasi tataran infrastruktur juga tidak terlepas dari masalah seperti yang terjadi pada tataran suprastruktur yang dikemukakan di atas. Ketika terjadi reformasi infrastruktur yang mencakup sistem kepartaian, sistem multi partai dipilih sebagai salah satu sistem kepartaian ideal yang cocok untuk bangsa Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena sistem multi partai lebih demokratis. Namun, pilihan sistem multi partai ternyata tidak tanpa masalah. Di satu pihak, sistem multi partai cenderung mendorong terjadinya perpecahan dalam tubuh par-

taif Demokrat berusaha merangkul partai-partai lain untuk membentuk suatu koalisi. Koalisi partai-partai diharapkan menjadi sumber dukungan bagi Presiden. Kenyataannya, koalisi mayoritas memang dapat terbentuk karena hanya PDI-P, Hanura dan Gerindra yang tidak ikut dalam koalisi untuk membentuk pemerintahan.

Koalisi partai yang membentuk pemerintahan dan yang melibatkan mayoritas partai politik secara relatif dan teoretis akan memberikan dukungan yang penuh kepada pemerintah. Apakah dalam kenyataannya koalisi partai yang membentuk pemerintahan memang betul-betul solid? Kasus Bank Century benar-benar menjadi kasus yang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai suatu bangsa yang ingin menikmati kehidupan bernegara yang harmonis, sejahtera dan demokratis. Sebab, kasus Bank Century sedikit banyak membuktikan bahwa soliditas koalisi partai-partai yang membentuk pemerintahan ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Koalisi partai-partai politik itu ternyata tidak begitu solid.

Dalam hubungan dengan ketidak-solidan partai-partai tersebut, ada kader partai politik yang menyatakan bahwa partainya berkoalisi bukan dengan Partai Demokrat tetapi dengan Presiden SBY. Demikian pula sebagai buntut kasus Bank Century muncul fenomena ancaman-mengancam dalam dunia perpolitikan Indonesia. Salah satu hal yang dianggap sebagai "ancaman" oleh anggota koalisi partai adalah isu reshuffle kabinet. Tentu saja isu itu tidak bisa dilihat sebagai isu yang terlepas

itu sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan partai-partai peserta koalisi untuk tetap solid dan memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah akan merasa sangat terganggu dengan adanya kasus Bank Century karena kasus ini mau tidak mau sangat menyita perhatian pemerintah. Namun, akar dari fenomena koalisi yang tidak solid itu sebenarnya bersumber dari sistem multi partai yang berlaku di Indonesia. Dengan sistem multi partai seperti sekarang memang sulit untuk membentuk koalisi yang solid yang diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah meskipun partai politik itu sendiri ikut membentuk pemerintahan. Sebab, masing-masing partai peserta koalisi memiliki agenda politik yang juga harus dilaksanakannya sesuai dengan harapan konstituennya. Oleh sebab itu, kasus Bank Century ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua bahwa koalisi yang dibentuk berdasarkan sistem multi partai sesungguhnya tidak cocok untuk disandingkan dengan sistem pemerintahan Presidensial. Untuk masa depan tidak ada salahnya kalau sistem multi partai yang berlaku di Indonesia sekarang ini ditinjau ulang. Semoga. ■

Penulis adalah Doktor Hukum Tata Negara lulusan Universitas Pella Harapan, Pengajar Hukum Tata Negara dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta